

Analisis Kualitas Pelaporan Keuangan dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan di Puskesmas Bantargadung

Eki Rahmattuwoh^{1*}, Acep Suherman², Iqbal Noor³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

Email: eki.na1418@gmail.com, acepsuherman@ummi.ac.id, iqnoor20@ummi.ac.id

Korespondensi penulis: eki.na1418@gmail.com*

Abstract: *This research was conducted to determine the quality of financial reporting and the level of accountability of financial reports at the Bantargadung Community Health Center, Sukabumi Regency. This research uses a qualitative method using an associative descriptive approach. The results of this research show that the Bantargadung Community Health Center has implemented Government Accounting Standards (SAP) in preparing its financial reports, but in preparing its financial reports the Bantargadung Community Health Center lacks human resources from accounting personnel so that the level of accountability in the financial reports at the Bantargadung Community Health Center is less than optimal.*

Keywords: *Quality, Financial Reporting, Accountability*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas pelaporan keuangan dan tingkat akuntabilitas laporan keuangan di Puskesmas Bantargadung, Kabupaten Sukabumi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif asosiatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas Bantargadung telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penyusunan laporan keuangannya. Namun, kekurangan sumber daya manusia di bidang akuntansi menyebabkan tingkat akuntabilitas laporan keuangan di Puskesmas Bantargadung belum optimal.

Kata Kunci: Kualitas, Laporan Keuangan, Akuntabilitas

1. PENDAHULUAN

Puskesmas Bantargadung adalah salah satu fasilitas kesehatan masyarakat yang terletak di desa Bantargadung kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi provinsi Jawa Barat. Puskesmas ini memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Bantargadung yang membawahi 7 desa-desa yang termasuk di dalamnya adalah desa Bantargadung, desa Bantargebang, desa Bojonggaling, desa Boyongsari, desa Buanajaya, desa Limusununggal, dan desa Mangunjaya.

Puskesmas Bantargadung menyajikan informasi realisasi, yaitu pendapatan yang terdiri dari pendapatan pelayanan masyarakat, pendapatan pelayanan dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan dan pendapatan APBD. Biaya-biaya yang merupakan biaya operasional antara lain biaya pembelian produk dan biaya lainnya. Proses pembuatan laporan keuangan yang terjadi pada Puskesmas Bantargadung dimulai dari bendahara Puskesmas Bantargadung mengumpulkan dan mencatat bukti transaksi ke buku kas umum lalu laporan keuangannya itu diperiksa oleh Inspektorat kabupaten sukabumi / Badan Pemeriksa Keuangan daerah provinsi sumber berdasarkan Pasal4 ayat 1 UU Nomor 15

tahun 2004 mengenai audit pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan neagara pasal 6 ayat (3) UU BPK No 15 Tahun 2006 Tentang BPK .

Suatu kualitas laporan keuangan dinyatakan tidak akurat itu terdapat faktor yang mempengaruhi termasuk kekurangan sumber daya manusia. Seperti di puskesmas bantargadung dalam pembuatan laporan keuangannya sudah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SA) No 13 sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yang dimana tiap Puskesmas harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Tetapi di Puskesmas Bantargadung kekurangan sumber daya manusia dari akuntansi sehingga dalam pembuatan laporan keuangannya pun tidak optimal.

Untuk meningkatkan suatu akuntabilitas laporan keuangan puskesmas itu harus memastikan laporan keuangan yang baik seperti, kepatuhan standar akuntansi, pemantauan internal, pelatihan dan pengembangan, transparansi informasi, penggunaan teknologi, pemeriksaan eksternal, komunikasi efektif, dengan mengimplementasikan hal hal berikut maka dalam pembuatan laporan keuangan di Puskesmas Bantargadung dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangannya. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik atau indikator kualitatif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yaitu relevan , andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami, kepatuhan terhadap standar akuntansi, transparansi, kelengkapan, konsistensi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Standar Akuntansi keuangan

Menurut (Dwi Martani, 2019:16) Standar akuntansi menyediakan pedoman untuk penyusunan laporan keuangan. Standar ini mencakup kerangka konseptual dan pernyataan standar akuntansi. Kerangka konseptual mencakup tujuan, komponen laporan, karakteristik kualitatif, dan asumsi dalam penyusunan laporan keuangan. Sementara itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) memberikan pedoman untuk penyusunan laporan, pengaturan transaksi atau kejadian, serta komponen spesifik dalam laporan keuangan. Pengaturan ini umumnya meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan komponen laporan keuangan. Di Indonesia, standar akuntansi yang berlaku terdiri dari empat pilar: Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kualitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kualitas laporan keuangan daerah merupakan ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus berkualitas, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Berikut adalah beberapa aspek penting yang menentukan kualitas laporan keuangan. (Rompas, F. V., dan Kindangen, 2022)

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Laporan keuangan Puskesmas harus mematuhi standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kepatuhan ini menjamin bahwa laporan tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diakui secara nasional.

b. Relevansi

Laporan keuangan harus menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Data yang disajikan harus terkini dan mencerminkan kondisi keuangan terbaru dari Puskesmas.

c. Keandalan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipercaya dan akurat. Artinya, data yang digunakan harus terverifikasi dan disajikan dengan transparan, tanpa adanya manipulasi atau kesalahan material.

d. Keterbandingan

Laporan keuangan harus dapat dibandingkan antara periode yang berbeda dan sesuai dengan standar yang berlaku. Ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menganalisis tren keuangan dan kinerja Puskesmas dari waktu ke waktu.

e. Transparansi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus transparan, mencakup semua aspek yang relevan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat yang memberikan mereka wewenang untuk mengurus kepentingan publik. Para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga terkait.

Bentuk pertanggungjawaban ini bervariasi tergantung pada jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas mencakup mekanisme pertanggungjawaban, sementara instrumen pendukungnya meliputi pedoman perilaku, sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan, dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. (Nunuy Nur Afiah, Sri Mulyani, 2020:4)

Kerangka Pemikiran

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, Puskesmas dijelaskan sebagai fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan masyarakat dan individu di tingkat dasar. Puskesmas memprioritaskan tindakan-tindakan promosi dan preventif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai unit teknis kesehatan, Puskesmas berada di bawah pengawasan dinas kesehatan di tingkat kabupaten/kota.

Akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah merujuk pada komitmen pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah, dengan tujuan mencapai sasaran yang diungkapkan melalui berbagai medium. Tingkat tanggung jawab diukur dari aspek kualitas dan kuantitas. Sebagai subjek pelaksana tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah, pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat.

Kualitas laporan keuangan harus menjadi perhatian semua pihak yang terlibat, mulai dari bendahara, sekretaris, hingga pimpinan puskesmas. Dengan menjaga kualitas laporan keuangan, diharapkan akan berdampak positif pada akuntabilitas laporan tersebut. Laporan keuangan yang akuntabel akan meningkatkan kepercayaan pimpinan, yaitu kepala dinas kesehatan dan kepala daerah. Selain itu, masyarakat juga akan percaya bahwa segala tindakan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang akan mereka nikmati. Dalam konteks ini, masyarakat diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif asosiatif. Penelitian dilakukan di Puskesmas Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sebelum Dilapangan

Analisis pra-lapangan dilakukan sebagai langkah awal penelitian untuk memahami kualitas pelaporan keuangan dan tingkat akuntabilitas di Puskesmas Bantargadung. Peneliti memulai dengan menanyakan kepada bendahara apakah sebelumnya pernah ada penelitian terkait laporan keuangan di Puskesmas Bantargadung, dan ditemukan bahwa belum pernah ada penelitian seperti itu.

Analisis Selama dan Setelah di Lapangan

Peneliti melakukan analisis selama dan setelah berada di lapangan untuk mengevaluasi kualitas pelaporan keuangan dan meningkatkan akuntabilitas. Observasi langsung dilakukan di Puskesmas Bantargadung, di mana peneliti mengamati kejadian atau fenomena yang sedang diteliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas. Selama berada di lapangan, pimpinan Puskesmas Bantargadung memperlihatkan laporan keuangan dari tahun-tahun sebelumnya kepada peneliti. Selain itu, peneliti terus melakukan wawancara dengan informan kunci untuk mendapatkan informasi mendalam, merekam data yang relevan, dan menilai kualitas pelaporan keuangan melalui pengamatan laporan-laporan sebelumnya.

Reduksi Data

Selama observasi langsung di lapangan, peneliti juga melakukan reduksi data. Proses ini melibatkan pemilihan data yang relevan dengan penelitian, yang kemudian akan disertakan dalam lampiran penelitian. Berikut adalah data-data yang diperoleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Selama melakukan observasi langsung di lapangan, peneliti juga melakukan reduksi data.

- Data Laporan keuangan Puskesmas Bantargadung.

- **Penyajian Data**

Setelah melakukan reduksi data, peneliti juga perlu menyajikan data. Penyajian data ini membantu dalam memahami kejadian selama proses di lapangan. Data dapat disajikan dalam bentuk teks naratif, grafik, atau matriks.

- **Kualitas Pelaporan Keuangan**

Puskesmas Bantargadung adalah fasilitas kesehatan yang berlokasi di Jl. Raya Palabuhanratu Km 24, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Berdiri sejak tahun 1979, Puskesmas ini melayani tujuh desa, yaitu Desa Limusnunggal, Desa Bojonggaling, Desa Bantargadung, Desa Mangunjaya, Desa Boyongsari, dan Desa Buana Jaya. Puskesmas Bantargadung memiliki peran penting bagi masyarakat Kecamatan Bantargadung dan sekitarnya, karena mendukung sistem kesehatan masyarakat setempat. Melalui upaya pencegahan penyakit, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi, Puskesmas ini membantu menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

Puskesmas Bantargadung tidak hanya fokus pada pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat, tetapi juga menawarkan berbagai program yang bermanfaat dan membantu masyarakat. Program-program tersebut termasuk Unit Kesehatan Masyarakat (UKM), Unit Kesehatan Perorangan (UKP), apotek, dan Postub. Berkat keberadaan Puskesmas Bantargadung, kesehatan masyarakat di Kecamatan Bantargadung dapat terjaga dengan baik. Laporan keuangan Puskesmas Bantargadung disusun setiap tahun dan biasanya selesai pada bulan Januari. Selain itu, terdapat juga laporan bulanan yang dicatat setiap bulan. Dalam proses penyusunan laporan keuangan Puskesmas Bantargadung, pimpinan Puskesmas pernah mencatat adanya kesalahan atau ketidakefisienan dalam pencatatan tersebut.

Oleh karena itu dalam pencatatan laporan keuangan pada waktu itu belum menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), adapun laporan keuangan yang telah dicatat pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 itu telah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No 217/PMK.05/2015 tentang pernyataan Standar Akuntansi pemerintah Berbasis Akruwal No 13 sehingga dalam laporan keuangan tersebut bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pencatatan ketika membuat laporan keuangan. Dalam pembuatan laporan keuangan Puskesmas

Bantargadung ini oleh bidan atau petugas kesehatan karena kekurangan sumber daya manusia dari akuntansi sehingga para pembuat laporan keuangan itu mengalami kesulitan untuk memahami cara pembuatan laporan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah. Sehingga bidan atau petugas kesehatan yang berada dalam Puskesmas Bantargadung ini dalam melakukan pembuatan laporan keuangan secara bersama karena keterbatasan dalam memahami suatu persyaratan standar akuntansi pemerintah.

Dalam pembuatan laporan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) itu tidak berbentuk PSAP, tetapi ketika membuat laporan keuangan BLUD itu menerapkan PSAP 13 tetapi Puskesmas Bantargadung pernah melakukan software khusus tetapi tidak optimal atau tidak akurat. Pada tahun 2024 ada rencana dalam pembuatan laporan keuangan Puskesmas Bantargadung dalam pencatatannya akan menggunakan software khusus yang dinamakan e-BLUD yang di keluarkan oleh kementerian dalam negeri.

Kualitas pelaporan keuangan di Puskesmas Bantargadung dapat diukur melalui beberapa indikator. Pertama, keandalan pelaporan keuangan harus dapat dipercaya dan bebas dari kesalahan material, dengan data yang mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Kedua, relevansi informasi keuangan harus sesuai dengan kebutuhan pengguna laporan seperti Puskesmas Bantargadung. Ketiga, keterbukaan pelaporan keuangan harus transparan sehingga pihak eksternal dapat memahami kondisi keuangan Puskesmas secara lengkap dan jelas. Keempat, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan menerapkan indikator-indikator tersebut, laporan keuangan di Puskesmas Bantargadung akan memiliki kualitas yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Oleh karena itu, kualitas pelaporan keuangan sangat penting untuk meyakinkan pemerintah pusat maupun masyarakat bahwa laporan keuangan di Puskesmas Bantargadung akurat dan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh, terdapat beberapa kelemahan dalam pelaporan keuangan di Puskesmas Bantargadung. Pertama, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, karena Puskesmas Bantargadung belum memiliki tenaga akuntansi yang memadai, sehingga kualitas pelaporan keuangan tidak optimal. Kedua, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang digunakan masih manual atau tidak memadai, yang menyebabkan data yang disajikan kurang akurat dan lambat. Ketiga, kurangnya pengawasan dan lemahnya

pengendalian internal, yang meningkatkan risiko kesalahan atau manipulasi data dalam laporan keuangan di Puskesmas Bantargadung.

Sistem pengendalian internal untuk memastikan keandalan keuangan di Puskesmas Bantargadung tidak diterapkan karena keterbatasan sumber daya manusia. Akibatnya, pengendalian internal di Puskesmas Bantargadung tidak ada, membuat upaya memastikan keandalan keuangan kurang efektif. Agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan Puskesmas Bantargadung, setiap tahun laporan tersebut diaudit. Auditor dari Pemda dan Inspektorat BPK Kabupaten melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan Puskesmas Bantargadung untuk meminimalkan kesalahan dalam pembuatannya.

➤ **Upaya Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan**

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di Puskesmas Bantargadung, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, kekurangan tenaga akuntansi merupakan masalah yang dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitas pelayanan kesehatan, serta berdampak pada pengelolaan keuangan yang kurang efektif. Puskesmas Bantargadung mengalami kesulitan dalam mengelola anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan secara akurat dan tepat waktu. Kesulitan dalam pengelolaan keuangan dapat menyebabkan pemborosan, ketidakakuratan dalam laporan keuangan, dan potensi penyalahgunaan dana.

Kekurangan tenaga akuntansi dapat mengakibatkan penundaan dalam penyusunan dan pengiriman laporan keuangan kepada otoritas terkait. Penundaan tersebut dapat berdampak pada evaluasi kinerja Puskesmas Bantargadung dan perencanaan anggaran di masa depan. Beban kerja yang berlebihan pada staf yang ada, terutama dengan keterbatasan tenaga akuntansi, sering kali mengakibatkan kelelahan dan penurunan produktivitas. Staf non-akuntansi juga mungkin harus menangani tugas-tugas akuntansi, yang dapat mengalihkan fokus dari tugas-tugas utama mereka. Ketidakakuratan atau kelengkapan data keuangan dapat menghambat manajemen Puskesmas Bantargadung dalam membuat keputusan yang tepat terkait perencanaan dan pengelolaan sumber daya. Masalah keuangan yang timbul akibat kekurangan tenaga akuntansi dapat merusak reputasi Puskesmas Bantargadung di mata masyarakat dan pihak donor. Selain itu, ketiadaan sistem informasi akuntansi juga membuat sulit bagi Puskesmas Bantargadung untuk mengelola laporan keuangan dengan optimal dan akurat.

Untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan di Puskesmas Bantargadung, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, melalui pelatihan dan pengembangan SDM dengan menyelenggarakan pelatihan berkala bagi staf Puskesmas dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan mereka. Kedua, dengan menerapkan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dan modern untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan. Ketiga, dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian internal untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar akuntansi yang berlaku. Keempat, melalui audit internal dan eksternal yang rutin untuk mengidentifikasi serta memperbaiki kesalahan atau kelemahan dalam pelaporan keuangan di Puskesmas Bantargadung.

Dengan meningkatnya akuntabilitas dalam laporan keuangan di Puskesmas Bantargadung, terlihat dampak positifnya. Hal ini mencakup peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dalam pelaporan keuangan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana di Puskesmas tersebut. Tidak hanya masyarakat, namun juga pemerintah pusat menjadi percaya dengan laporan keuangan Puskesmas Bantargadung ketika proses pembuatannya sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

5. SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

- a. Kualitas pelaporan keuangan di Puskesmas Bantargadung dapat dinilai berdasarkan beberapa indikator. Pertama, keandalan pelaporan keuangan harus dapat dipercaya dan bebas dari kesalahan material, dengan data yang mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Kedua, relevansi informasi keuangan harus sesuai dengan kebutuhan pengguna laporan, termasuk Puskesmas Bantargadung. Ketiga, keterbukaan pelaporan keuangan harus transparan agar memungkinkan pihak eksternal memahami kondisi keuangan Puskesmas secara menyeluruh dan jelas. Keempat, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan.
- b. Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh, teridentifikasi beberapa kelemahan dalam pelaporan keuangan di Puskesmas Bantargadung. Pertama, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten karena Puskesmas Bantargadung belum memiliki tenaga akuntansi yang memadai, mengakibatkan

kualitas pelaporan keuangan yang tidak optimal. Kedua, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang kurang memadai, masih menggunakan sistem manual atau sistem yang tidak memadai dalam pengelolaan keuangan, menyebabkan data yang disajikan kurang akurat dan lambat. Ketiga, kurangnya pengawasan dan pengendalian internal yang lemah meningkatkan risiko kesalahan atau manipulasi data dalam laporan keuangan di Puskesmas Bantargadung.

SARAN

- 1) **Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia**
Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan rutin dan sertifikasi di bidang akuntansi pemerintah perlu dilakukan. Pelatihan tersebut harus mencakup pemahaman yang mendalam tentang standar akuntansi pemerintah dan penerapannya dalam praktik.
- 2) **Penerapan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi**
Mengembangkan dan menerapkan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi bertujuan untuk menjamin konsistensi, akurasi, dan kepatuhan waktu dalam penyusunan laporan keuangan.
- 3) **Peningkatan kontrol internal**
Meningkatkan mekanisme kontrol internal untuk memeriksa setiap transaksi dengan akurat dan memastikan adanya dokumentasi yang memadai. Ini bisa dilakukan dengan menerapkan prosedur audit internal secara lebih sering dan terstruktur.
- 4) **Transparansi dan akses informasi**
Untuk meningkatkan transparansi, Puskesmas bisa meningkatkan aksesibilitas informasi bagi para pemangku kepentingan. Ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempublikasikan laporan keuangan secara online dan memberikan akses kepada masyarakat untuk memantau penggunaan dana.
- 5) **Evaluasi dan monitoring berkala**
Melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan pelaporan keuangan untuk mengidentifikasi area-area yang masih membutuhkan peningkatan.
- 6) **Peningkatan kapasitas sumber daya manusia**
Kualitas pelaporan keuangan sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia yang terlibat. Ditemukan bahwa masih diperlukan pelatihan tambahan bagi bendahara dan staf lainnya agar dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Martani, D. (2019). *Akuntansi keuangan menengah berbasis PSAK* (E. S. Suharsi, Ed.; 2nd ed.).
- Nur Afiah, N., Mulyani, S., & A.A. (2020). *Akuntansi pemerintah daerah berbasis accrual pada entitas akuntansi* (Cik Basir, Ed.; 1st ed.). https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=XtjuDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=konsep+akuntansi+pemerintah&ots=zcdWMPKKWO&sig=1Y8cxFwQ3FmJGAbh_3oiQg3rl2Y&redir_esc=y#v=onepage&q=konsep%20akuntansi%20pemerintah&f=false
- Rompas, F. V., & Kindangen, W. D. (2022). Analisis kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 461–468.